

SKRIPSI

**ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA
DI JAWA BARAT 2017-2021**

EVANTY CAESARISMA



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

**ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA
DI JAWA BARAT 2017-2021**

Sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh:

EVANTY CAESARISMA



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

**ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN/ KOTA
DI JAWA BARAT 2017-2021**

Disusun dan diajukan oleh:

EVANTY CAESARISMA

A011191171

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, Februari 2023

Pembimbing I

Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si, CSF.
NIP. 19590303 198810 1 001

Pembimbing II

Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF.
NIP. 19681221 199512 1 001

Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Hasanuddin



SE., M.Si., CWM.
NIP. 19740715 200212 1 003

SKRIPSI

ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA
DI JAWA BARAT 2017-2021

Disusun dan diajukan oleh :

EVANTY CAESARISMA

A011191171

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 21 Maret 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Bakhtiar Mustari., M.Si., CSF.	Ketua	1.....
2	Dr. Hamrullah., S.E., M.Si., CSF.	Sekretaris	2.....
3	Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E, M.Si CWM®	Anggota	3.....
4	Dr. Sabir, SE, M.Si CWM®	Anggota	4.....



Dr. Sabir, SE, M.Si CWM®
NIP. 19740715 2000212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama Mahasiswa : **EVANTY CAESARISMA**
Nomor Pokok : **A011191171**
Program Studi : **Ekonomi Pembangunan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas
Hasanuddin**
Jenjang : **Sarjana (S1)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ***Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2017-2021*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi

Makassar, April 2023
Yang menyatakan



(Evanty Caesarisma)

A011191171

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021” dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini dibuat bukan hanya untuk sebagai pemenuhan persyaratan bagi penulis guna mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, akan tetapi penulis mengharapkan masalah ekonomi yang penulis kaji dapat tergambarkan dalam bentuk skripsi sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang telah penulis peroleh selama menjadi mahasiswa ekonomi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis dengan terbuka akan menerima kritik maupun masukan dari pembaca terkait tulisan ini agar skripsi ini dapat berguna lebih baik bagi para pembaca.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penyusunan tidak terlepas dari partisipasi beberapa pihak terkait yang telah mendukung penulis secara penuh. Maka dari itu, penulis merasa wajib menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada mereka secara khusus sebagai berikut:

1. Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. atas kehendak dan karunia-Nya yang memberikan penulis kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dan kepada Nabiullah Muhammad SAW.
2. Kedua orang tua saya yang telah mendidik serta ketiga saudara saya Egi, Dani dan Rehan yang telah memotivasi, dan memberikan dukungan lahir dan batin.

Terima kasih telah menjadi keluarga yang berhasil membawa penulis hingga titik ini.

3. Bapak Dr. Sabir, SE, M.Si CWM® selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi. Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Ekonomi.
4. Bapak Dr. Bakhtiar Mustari, M.Si., CSF., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF., selaku pembimbing II, penulis sangat berterimakasih atas segala pemikiran, ide, bantuan, arahan, nasehat, kesabaran, dan waktu yang diluangkan selama proses hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Dosen penguji Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si., CWM®, dan Bapak Dr. Sabir, SE, M.Si CWM®, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas saran dan kritik terhadap hasil penelitian sehingga lebih menyempurnakan tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan pengetahuan dan menginspirasi, terima kasih atas segala pembelajaran dan bantuan selama masa studi penulis.
7. Staf dan karyawan akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terkhusus Pak Aspar, Pak Oscar dan Pak Rahim yang telah banyak membantu dalam segala hal terkait berkas dan dokumen akademik.
8. Untuk Athalia Alamanda Alfatah terimakasih sudah menjadi teman evanty dari semester 1 sampai selesai, terimakasih atas semua bantuannya tal dalam bentuk apapun itu, terimakasih pertemanan yang membawa kearah positif serta negatif ini. Kalau tal bangga berteman sama saya, saya juga bangga punya teman seperti

talia anak bungsu yang super kereenn. Walaupun sebentar lagi berakhir harapan penulis semoga pertemanan kita tidak hanya sampai disini.

9. Untuk Dwi Utami Putri terimakasih sudah jadi temannya evanty walau tidak dari awal semester tapi evanty bersyukur bisa bertemu kembali dengan duwikk. Terimakasih atas bantuannya dalam bentuk apapun itu duwik. Kamu jugaa anak bungsu yang suuper kerenn. Harapan penulis pertemanan kita tidak hanya sampai disini duwik.
10. Untuk Muh. Rifqi Surahman, Gabriel James, Kwan Wirawan Kwandou terimakasih atas bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa, penulis sangat bersyukur bertemu kalian yang super kocak tetapi punya tujuan berkuliah yang jelas.
11. Untuk teman-teman GRIFFINS yang tidak dapat saya sebut satu persatu, terimakasih atas pertemanannya selama menjadi mahasiswa Universitas Hasanuddin, terimakasih atas bantuannya.

Akhir kata, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam melakukan penulisan skripsi ini dan senantiasa mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. dan diberi balasan dengan sebaik – baik balasan dan senantiasa melimpahkan ridho dan berkah-Nya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 3 April 2023

Evanty Caesarisma

ABSTRAK**ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN/ KOTA
DI JAWA BARAT 2017-2021**

**Evanty Caesarisma
Bakhtiar Mustari
Hamrullah**

Ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang ada di setiap negara dan merupakan masalah yang berkelanjutan sehingga menjadi masalah yang harus segera diatasi. Kesenjangan pendapatan antarpenduduk suatu wilayah dapat dilihat dari indeks gini yang tidak merata di Provinsi Jawa Barat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2017-2021. Penelitian ini menggunakan data panel dengan jumlah sampel sebanyak 27 kabupaten/kota dengan jangka waktu 5 tahun. Model analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan teknik estimasi Generalized Least Square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, investasi PMTB dan upah minimum berpengaruh signifikan. Hal ini didukung oleh uji statistik yang menunjukkan seluruh variabel independen pada taraf signifikansi 5% dengan probabilitas 0,00.

Kata Kunci : Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi PMTB, Upah Minimum.

ABSTRACT**ANALYSIS OF REGENCY/CITY INCOME INEQUALITY IN
WEST JAVA IN 2017-2021****Evanty Caesarisma****Bakhtiar Mustari****Hamrullah**

Income inequality is a problem that exists in every country and is an ongoing problem so it becomes a problem that must be addressed immediately. The income gap between residents of a region can be seen from the Gini index which is not evenly distributed in West Java Province which has an impact on people's welfare. Therefore, this study aims to determine the factors that cause income inequality in regencies/cities in West Java Province for the 2017-2021 period. This study uses panel data with a total sample of 27 districts/cities with a period of 5 years. The analysis model used is multiple regression with the Generalized Least Square estimation technique. The results of this study indicate that economic growth, PMTB investment and minimum wages have a significant effect. This is supported by statistical tests which show all independent variables at a significance level of 5% with a probability of 0,00.

Keywords: Income Inequality, Economic Growth, PMTB Investment, Minimum Wage.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Teori.....	9
2.1.1 Teori Kuznet	9
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	14
2.1.3 Investasi	15
2.1.4 Upah Minimum	17
2.2 Hubungan Antar Variabel	19
2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pendapatan.....	19
2.2.2 Hubungan Investasi dengan Ketimpangan Pendapatan	20
2.2.3 Hubungan Upah Minimum dengan Ketimpangan Pendapatan.....	20
2.3 Studi Empiris.....	21
2.4 Kerangka Pikir	22

2.5 Hipotesis Penelitian	24
BAB III. METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	25
3.2 Lokasi Penelitian.....	25
3.3 Jenis dan Sumber Data	25
3.4 Metode Pengumpulan Data	26
3.5 Model Analisis Data	26
3.6 Uji Asumsi Klasik	27
3.7 Pengujian Hipotesis	30
3.7.1 Uji Statistik.....	30
3.8 Defenisi Operasional	32
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	34
4.1.1 Keadaan Geografis Jawa Barat.....	34
4.2 Perkembangan Variabel Penelitian.....	35
4.2.1 Perkembangan Data Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021	36
4.2.2 Perkembangan Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021	38
4.2.3. Perkembangan Data Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021	40
4.2.4 Perkembangan Data Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021	42
4.3 Hasil Estimasi	44
4.3.1 Uji Model Regresi Data Panel	44
4.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	47
4.3.3 Hasil Uji Statistik.....	50
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	54
4.4.1 Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021	54
4.4.2 Analisis Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021.....	55

4.4.3 Analisis Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021	56
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Gini Tertinggi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2021.....	3
Tabel 1.2 Perbandingan Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2017-2021	4
Tabel 2.1 Ukuran Nilai Indeks Gini	13
Tabel 4.1 Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021 (Indeks).....	37
Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021.....	39
Tabel 4.3 Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021.....	41
Tabel 4.4 Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021	43
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow.....	45
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman	46
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas	48
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	49
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi	49
Tabel 4.10 Analisis Regresi Variabel Koefisien	50
Tabel 4.11 Hasil Uji F.....	51
Tabel 4.12 Hasil Uji t	52
Tabel 4.13 Hasil R^2	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	24
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

I. Rekapitulasi Data.....	63
II. Hasil Transformasi Data.....	67
III. Hasil Estimasi	71
IV. Koefisien Kabupaten/Kota	75
V. Biodata	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi selalu menjadi tolak ukur keadaan perekonomian suatu wilayah, struktur ekonomi dan semakin tereduksinya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Setiap wilayah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya dapat diukur dengan pembangunan ekonomi melalui Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan tujuan yang sama yakni menekan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Indeks ketimpangan yang lazim dikenal dengan “Koefisien Gini” mencerminkan ketimpangan pendapatan masyarakat dibandingkan dengan pendapatan masyarakat lainnya yang apabila skalanya mendekati nol mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Perbedaan pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak perbedaan tingkat kesejahteraan daerah, yang pada akhirnya akan menyebabkan ketimpangan pendapatan antar daerah, dengan kata lain ketimpangan pendapatan suatu daerah semakin besar.

Permasalahan terkait ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan yang ada di setiap negara dan merupakan permasalahan yang berkelanjutan sehingga menjadi permasalahan yang harus segera diatasi.

Kesenjangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah dapat dilihat dari indeks gini yang tidak merata di berbagai Provinsi di Indonesia sehingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Jika pendidikan meningkatkan pendapatan karena pendidikan lebih tinggi di atas distribusi pendapatan, itulah yang menyebabkan ketimpangan pendapatan. Hal tersebut memerlukan upaya khusus dari pemerintah dalam mengambil kebijakan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan berbagai usaha dalam rangka peningkatan distribusi pendapatan dari berbagai aspek.

Perekonomian daerah yang tinggi tidak menjamin adanya pemerataan pendapatan, namun pertumbuhan ekonomi yang pesat tetap dipandang sebagai strategi unggulan pembangunan ekonomi. Padahal, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan percepatan tidak menghilangkan ketimpangan. Perbedaan paling nyata dalam pembangunan adalah pada aspek pendapatan yang melahirkan kelompok kaya dan miskin, pada aspek spasial yang mengarah pada daerah maju dan tertinggal, dan pada aspek sektoral yang menghasilkan sektor unggulan dan non unggulan.

Di Indonesia saat ini telah terjadi ketimpangan pendapatan/ perbedaan distribusi pendapatan antar masyarakat dalam wilayah yang sama dan cukup mencolok.

Untuk melihat seberapa timpang pendapatan yang terjadi berdasarkan Provinsi di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data gini ratio dengan nilai tertinggi pada tahun terakhir yakni 2021.

Tabel 1.1
Indeks Gini Tertinggi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2021

PROVINSI	INDEKS GINI
	TAHUN
	2021
DI YOGYAKARTA	0,436
DKI JAKARTA	0,411
GORONTALO	0,409
JAWA BARAT	0,406
PAPUA	0,396
SULAWESI TENGGARA	0,394
NUSA TENGGARA BARAT	0,384
SULAWESI SELATAN	0,377
BALI	0,375
PAPUA BARAT	0,374

Sumber : Badan Pusat Statistik

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 terdapat 10 Provinsi yang memiliki indeks gini yang paling tinggi berdasarkan data tahun terakhir, Provinsi Jawa Barat salah satunya dengan indeks gini tahun terakhir sebesar 0,406 bahkan lebih besar dibandingkan indeks gini secara nasional (Indonesia) data tahun terakhir yakni sebesar 0,381. Nilai indeks gini memiliki nilai 0 hingga 1, semakin tinggi indeks gini maka dapat dikatakan semakin tinggi ketimpangan yang terjadi di wilayah tersebut.

Gini ratio Provinsi Jawa Barat diberitakan selalu berada diatas gini ratio Indonesia. Berikut merupakan perbandingan nilai gini ratio Provinsi Jawa Barat dengan gini ratio Indonesia selama 5 tahun terakhir.

Ketimpangan pendapatan yang ada di Jawa Barat cukup serius untuk diperhatikan, jika tidak tangani dengan mencari tahu faktor penyebab ketimpangan Jawa Barat, akan berpotensi memiliki dampak.

Tabel 1.2
Perbandingan Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Indonesia
Tahun 2017-2021

	INDEKS GINI				
	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
JAWA BARAT	0,403	0,407	0,402	0,403	0,406
INDONESIA	0,393	0,384	0,380	0,385	0,381

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik selama 5 tahun terakhir, indeks gini Provinsi Jawa Barat tidak pernah berada dibawah indeks gini Indonesia. Indeks gini Provinsi Jawa Barat selalu menyentuh hingga angka 0,400. Sedangkan indeks gini Indonesia tidak pernah menyentuh angka 0,400, indeks tertinggi yang dicapai Indonesia selama 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 sebesar 0,393.

Indeks gini tidak berimbang dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat umumnya berada di atas tingkat nasional. Dapat dikatakan bahwa Provinsi Jawa Barat gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam proses pembangunannya, atau pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tidak menghasilkan pertumbuhan yang inklusif. Sering terjadi *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.

Menurut Kanbur (2010), pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang dapat meningkatkan pemerataan dan aksesibilitas untuk semua dan pertumbuhan inklusif mencerminkan pertumbuhan yang dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Sehingga nantinya pertumbuhan inklusif ini mengatasi permasalahan pembangunan melalui prinsip peningkatan

pertumbuhan (*pro-growth*), penciptaan lapangan kerja (*pro-job*) dan penyeimbangan dalam ketimpangan (*pro-poor*).

Kemerataan distribusi pendapatan merupakan salah satu target atau tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan, dimana distribusi pendapatan merupakan pembagian penghasilan atau pemerataan pendapatan di suatu wilayah bertujuan untuk menekan tingkat kesenjangan di dalam masyarakat. Dalam proses produksi, pemilik faktor produksi akan menerima kompensasi atas faktor produksi yang berkontribusi dalam proses produksi. Proses distribusi pendapatan ini akan berlangsung dalam siklus (perputaran) konsumen yang harus membayar harga barang. Tetapi di sisi lain, menjadi pemasok faktor modal, tenaga kerja, sumber daya alam atau faktor jasa sehingga, akan menerima sebagian dari pendapatan pada waktu tertentu dan membayar harganya pada waktu lain.

Teori Kuznets menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki hubungan lurus dengan pertumbuhan ekonomi, pada saat produktivitas tenaga kerja meningkat akan mempengaruhi output, meningkatnya output terindikasi bahwa pekerja wilayah sekitar produktif dan memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Output tersebut akan terhitung dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah dan akan mengurangi tingkat perbedaan pendapatan.

Investasi pula dalam teorinya mengatakan bahwa pembentukan modal merupakan faktor penting yang menentukan pembentukan pertumbuhan

ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat, naik turunnya investasi yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor ketimpangan pendapatan terjadi

Disisi lain dalam teori ekonomi neoklasik berpendapat bahwa upah minimum dapat meningkatkan daripada mengurangi ketimpangan pendapatan. Upah minimum menyebabkan, non-pasar, berperan dalam menentukan ambang batas upah minimum di pasar tenaga kerja, membuat harga tenaga kerja lebih mahal. Jika harga pekerja naik, upah minimum akan menyebabkan penurunan permintaan pekerja dan pekerja akan kehilangan pekerjaan.

Selain dari data serta teori pendukung, peneliti juga memberikan penelitian yang membahas ketimpangan pendapatan. Penelitian tersebut antara lain. Oleh F. Ramadhan (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Berbanding terbalik dengan penelitian RF Yoertiara (2022) yang menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Dalam penelitian N. Hartini (2017) bahwa variabel investasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, berbanding terbalik dengan hasil penelitian S. Holijah (2022) yang menyatakan bahwa investasi tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Menurut SN Sungkar dkk. (2015) menyatakan bahwa upah minimum dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan, sedangkan menurut AN

Tsamara (2021), bahwa upah minimum tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan judul, **“Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021.
2. Apakah investasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021.
3. Apakah upah minimum kabupaten/kota berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021
2. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021
3. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya yang bertemakan ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah minimum kabupaten/kota.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

Tinjauan teori merupakan landasan yang digunakan sebagai pedoman tertulis yang memudahkan peneliti untuk mengarahkan faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian.

2.1.1 Teori Kuznets

Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan kemakmuran kondisi perekonomian di dalam masyarakat suatu wilayah. Ketimpangan pendapatan terjadi karena adanya perbedaan pendapatan. Menurut Sukirno (2006), ketimpangan pendapatan merupakan suatu konsep yang membahas tentang persebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat.

Ketimpangan pendapatan ditentukan oleh tingkat pembangunan suatu negara, heterogenitas etnis, dan adanya kediktatoran dan pemerintahan yang gagal. Ketimpangan pendapatan muncul pada tahap awal pertumbuhan ekonomi. Pada titik ini, distribusi pendapatan akan memburuk, tetapi tahap selanjutnya akan meningkatkan distribusi pendapatan, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil.

Simon Kuznets berpendapat bahwa distribusi pendapatan cenderung menjadi lebih buruk, atau tidak merata pada tahap awal pertumbuhan ekonomi,

tetapi membaik pada tahap selanjutnya. Pembangunan ekonomi pada tahap awal mengalami proses penurunan yang cukup besar dalam distribusi pendapatan, pada saat terjadinya pembangunan yang lebih meningkat garis ketimpangan berbalik menuju tingkat ekuitas yang lebih tinggi dalam pembagian pendapatan. Pada kurva yang ditunjukkan oleh Kuznets, menunjukkan bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan per kapita dengan ketimpangan pendapatan, sebaliknya dalam jangka panjang antara keduanya menjadi korelasi negatif. Kurva Kuznets biasanya dikenal dengan kurva “U-terbalik”.

Menurut Todaro (2003), alasan mengapa pada tahap awal pembangunan distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun kemudian membaik, ini dikaitkan dengan kondisi-kondisi dasar perubahan yang bersifat struktural. Menurut model Lewis, tahapan pertumbuhan awal akan terpusat di sektor industri modern yang memiliki lapangan kerja terbatas namun dengan tingkat upah dan produktivitas terhitung tinggi. Kurva Kuznets dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor ekonomi modern, seiring dengan perkembangan sebuah negara dari perekonomian tradisional ke perekonomian modern.

Ketimpangan tidak bisa diberantas, hanya bisa direduksi ke tingkat yang dapat diterima oleh nilai tertentu sehingga keseimbangan dalam struktur pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Oleh karena itu, tidak heran jika ketimpangan akan selalu ada, baik itu di negara miskin, negara berkembang,

bahkan negara maju. Hanya saja perbedaannya adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi di masing-masing negara tersebut. Jika ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh semua lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan telah terjadi ketimpangan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan suatu wilayah Adelman dan Morris (1973).

- a) Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan menurunnya pendapatan perkapita.
- b) Inflasi, dimana masyarakat memegang uang tetapi tidak diikuti dengan penambahan produksi barang.
- c) Ketidakmerataan pembangunan wilayah.
- d) Banyaknya investasi dalam proyek yang padat modal (*Capital Intensive*), sehingga tingkat pendapatan modal dari kerja tambahan lebih besar dibandingkan tingkat pendapatan orang yang bekerja, yang dapat memicu meningkatnya pengangguran.
- e) Kurangnya mobilitas sosial.
- f) Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
- g) Menurunnya nilai tukar (*Term of Trade*) bagi negara berkembang dalam melakukan perdagangan dengan negara maju, akibat

ketidakelastisan permintaan di negara maju terhadap barang ekspor negara berkembang.

h) Menurunnya produktifitas industri kreatif.

Beberapa metode yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan, yaitu:

a) Menurut Bank Dunia

Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok dengan pendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk secara menyeluruh.

1. Tingkat ketimpangan berat, apabila 40% penduduk paling miskin menerima $< 12\%$ dari pendapatan nasional.
2. Tingkat ketimpangan sedang, apabila 40% penduduk paling miskin menerima $12-17\%$ dari pendapatan nasional.
3. Tingkat ketimpangan ringan, apabila 40% penduduk paling miskin menerima $> 17\%$ dari pendapatan nasional.

b) Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menunjukkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di seluruh populasi. Kurvanya berbentuk persegi panjang,

dengan sisi vertikal mewakili persentase kumulatif pendapatan nasional dan sisi horizontal mewakili persentase kumulatif populasi. Kurva ditempatkan secara diagonal di bujur sangkar tersebut. Semakin dekat kurva Lorenz ke diagonal (linier), semakin seragam distribusi pendapatan nasional, sebaliknya, semakin jauh Kurva Lorenz dari diagonal (melengkung) maka semakin menunjukkan ketimpangan pendapatan yang tinggi dan distribusi pendapatan nasional semakin timpang.

c) Indeks Gini

Koefisien Gini atau Gini Index digunakan untuk mengetahui hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan.

Koefisien Gini dihitung dengan akumulasi luas antara diagonal dan Kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total setengah persegi di mana kurva Lorenz berada.

Tabel 2.1
Ukuran Nilai Indeks Gini

Nilai Koefisien	Distribusi pendapatan
< 0,4	Tingkat Ketimpangan Rendah
0,4 – 0,5	Tingkat Ketimpangan Sedang
> 0,5	Tingkat Ketimpangan Tinggi

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), nilai rasio gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Nilai rasio gini yang mendekati 1

menunjukkan ketimpangan yang semakin besar. Rasio gini dengan nilai 0, menunjukkan bahwa pendapatan terdistribusi sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemajuan suatu wilayah. Singkatnya, pertumbuhan ekonomi dapat diperiksa dengan mencapai total Produk Domestik Bruto atau PDB suatu wilayah dengan komponen pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sukirno (2006), alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Perekonomian wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ketahun dikarenakan adanya penambahan pada faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai pula dengan pendapat dari Simon Kuznets.

Teori Kuznets, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin pada awalnya mengarah pada kemiskinan yang tinggi dikarenakan distribusi pendapatan yang tidak merata. Namun, jika negara miskin terus berkembang, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan dan meratanya distribusi pendapatan. Ekonom klasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi selalu cenderung berkurang, meskipun masih dalam tahap awal pertumbuhan. Berdasarkan pengamatannya, beberapa negara

seperti Taiwan, Hongkong, Singapura dan China. Kuznets optimis bahwa pertumbuhan ekonomi justru mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

2.1.3 Investasi

Menurut Mankiw (2000), investasi adalah instrumen yang diperoleh seseorang atau perusahaan untuk menambah modalnya.

Investasi atau penanaman modal adalah pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi di negara berpenghasilan rendah menjadi salah satu penyebab ketimpangan pendapatan. Pasalnya, hanya kawasan yang menarik perhatian investor baik dalam maupun luar negeri yang dianggap menguntungkan.

Ada tiga jenis pengeluaran investasi, yakni sebagai berikut:

1. Investasi tetap bisnis (*business fixed investment*) merupakan peralatan dan perlengkapan yang dibeli oleh perusahaan untuk proses produksi.
2. Investasi residensial (*residential investment*) merupakan pembelian tempat tinggal baru dan property sewa pemilik-penghuni.

3. Investasi persediaan (*inventory investment*) merupakan barang-barang seperti bahan inventaris, barang dalam proses dan barang jadi yang dimiliki perusahaan di gudang.

Dalam pembangunan ekonomi sendiri ada juga yang disebut investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Kontribusi PMTB terhadap laju pertumbuhan menunjukkan dengan peningkatan alokasi pendapatan masyarakat yang diinvestasikan dalam bentuk fisik berupa bangunan, mesin dan lainnya. PMTB juga merupakan komponen terpenting dalam pembentukan PDB/PDRB terbesar setelah konsumsi rumah tangga.

Dalam teori investasi Harrod-Domar (Arsyad, 1999), pembentukan modal/investasi merupakan determinan penting dari pertumbuhan ekonomi. Menurut teori Harrod-Domar, diperlukan investasi baru sebagai tambahan modal untuk mempercepat perekonomian. Berdasarkan teori Harrod-Domar yang menjelaskan terdapat hubungan antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi di suatu daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita rendah karena tidak ada aktivitas ekonomi yang produktif dan terjadi konsentrasi investasi pada satu wilayah saja.

Investasi dapat mengurangi ketimpangan pendapatan apabila persebaran investasi merata sehingga meningkatkan produktivitas dan pengoptimalan sumber daya alam serta faktor produksi.

2.1.4 Upah Minimum

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang digabung upah pokok dan tunjangan tetap dari karyawan yang lebih rendah dan kurang dari satu tahun pengalaman kerja di wilayah tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja: PER/MEN/No.18 tahun 2022, tentang upah minimum, bahwa kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/ buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam menjaga daya beli masyarakat.

Upah Minimum Regional (UMR) dibedakan menjadi dua, yaitu Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk. I) dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II). istilah upah minimum regional Tingkat I (UMR Tk. I) diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional I Tingkat I (UMR Tk.II) juga mengalami perubahan menjadi Upah Minimum kabupaten/kota (UM kab./ kota)

Upah minimum merupakan kebijakan yang berguna untuk memastikan pekerja mendapatkan upah yang adil bersamaan untuk mencegah kemiskinan di antara para pekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Waldman & Whalen (2007), upah minimum merupakan hal utama dalam penetapan upah secara nasional, tidak hanya itu tetapi upah dapat pula mempengaruhi pendapatan. Mereka yang bekerja di sektor formal menjadi sasaran kebijakan pengupahan minimum. Mereka tidak menerima upah

kurang dari gaji upah minimum yang sah. Maka dari itu, upah minimum muncul untuk melindungi pekerja bagian bawah hingga sering menjadi isu kelas menengah.

Menurut Fachrurrozi (2014), upah dapat diartikan sebagai penghasilan yang diterima pekerja sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan. Upah muncul berdasarkan kontrak kerja yang disepakati, terlepas dari pekerjaannya dan demonisasinya. Pemberian upah baik dalam bentuk uang tunai maupun uang digital.

Teori ekonomi neoklasik berpendapat bahwa upah minimum dapat meningkatkan daripada mengurangi ketimpangan pendapatan. Upah minimum menyebabkan pemerintah berperan dalam menentukan standar upah minimum di pasar tenaga kerja, jika digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan menyebabkan meningkatnya biaya produksi perusahaan yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi. Konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan barang, yaitu mengurangi konsumsi terhadap barang bahkan tidak lagi ingin membeli barang tersebut. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksi hingga ada kemungkinan perusahaan akan memutuskan kerja sama dengan tenaga kerja yang akan menyebabkan penurunan permintaan pekerja dan pekerja akan kehilangan pekerjaan.

2.2 Hubungan Antar Variabel

Hubungan antar variabel dimana variabel bebas (Independen/ berpengaruh) dengan variabel terikat (Dependen/ terpengaruh) dengan simbol X dan Y biasanya dikaitkan dengan analisis hubungan kausal (hubungan sebab akibat).

2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi pengukuran pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu daerah atau wilayah selama periode waktu tertentu. Perbedaan laju pertumbuhan wilayah diindikasikan bahwa pendapatan perkapita rendah yang akan menyebabkan perbedaan pendapatan masyarakat di regional yang sama.

Menurut Todaro (2008), teori Kuznets dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan, artinya pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan. Namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi negatif, artinya peningkatan pendapatan akan diikuti dengan penurunan ketimpangan distribusi pendapatan.

2.2.2 Hubungan Investasi dengan Ketimpangan Pendapatan

Investasi atau penanaman modal adalah pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi di negara berpenghasilan rendah menjadi salah satu penyebab ketimpangan pendapatan. Pasalnya, hanya kawasan yang menarik perhatian investor baik dalam maupun luar negeri yang dianggap menguntungkan.

Berdasarkan teori Harrod-Domar yang menjelaskan terdapat hubungan antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi di suatu daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita rendah karena tidak ada aktivitas ekonomi yang produktif dan terjadi konsentrasi investasi pada satu wilayah saja.

2.2.3 Hubungan Upah Minimum dengan Ketimpangan Pendapatan

Upah minimum merupakan kebijakan yang berguna untuk memastikan pekerja mendapatkan upah yang adil bersamaan untuk mencegah kemiskinan di antara para pekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Secara teori ekonomi neoklasik berpendapat bahwa upah minimum dapat meningkatkan daripada mengurangi ketimpangan pendapatan. Upah minimum menyebabkan pemerintah, berperan dalam menentukan ambang batas upah minimum di pasar tenaga kerja, jika upah minimum meningkat akan

meningkatkan biaya produksi perusahaan, meningkatkan harga barang produksi dan akan menurunkan daya beli terhadap barang tersebut. Akibatnya produsen akan menurunkan jumlah produksi hingga memutus kerja sama dengan tenaga kerja sehingga menyebabkan timbulnya perbedaan pendapatan dalam suatu wilayah yang sama.

2.3 Studi Empiris

Nangarumba (2015) dalam penelitiannya dengan hasil yang dicapai dalam penelitian ini salah satunya adalah ditemukan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan pengaruh negatif, kecuali variabel PDRB Sektor Industri. Sedangkan elastisitas, masing-masing variabel independen bersifat inelastis terhadap ketimpangan pendapatan.

Arif dan Wicaksani (2017) dalam penelitiannya dengan menggunakan empat variabel independen yaitu IPM, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan jumlah penduduk. Menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2015 adalah variabel IPM dengan arah koefisien positif.

Ningtyas (2018) dalam penelitiannya dengan hasil analisis menunjukan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Investasi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan

Nadhifah dan Wibowo (2021) dalam penelitiannya dengan hasil analisis diketahui bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan variabel jumlah pekerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, selain itu tingkat pengangguran tersembunyi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian ini berimplikasi pada teori ketimpangan pendapatan dan kebijakan yang diambil untuk mengatasi ketimpangan dengan memperhatikan jumlah tenaga kerja dan tingkat pengangguran tersembunyi di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2013-2019.

Riandi dan Varlitya (2020) dalam penelitiannya dengan hasil menunjukkan bahwa, upah minimum mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan sedangkan kemiskinan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

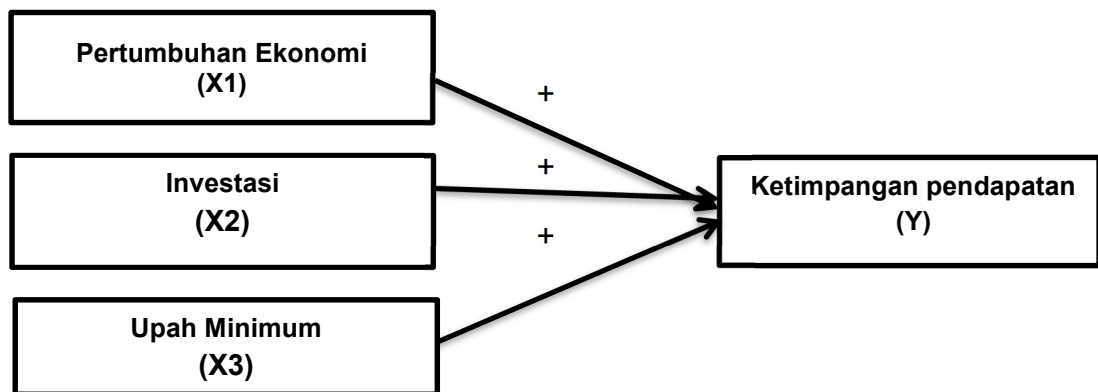
2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan pemaknaan dari konsep yang digunakan sehingga memudahkan peneliti mengoperasikan konsep.

Masalah ketimpangan pendapatan yang ditimbulkan dari faktor ekonomi merupakan masalah yang kompleks terjadi hampir di seluruh wilayah. Dalam

penelitian analisis ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah (1) pertumbuhan ekonomi, (2) investasi, (3) upah minimum. Variabel-variabel tersebut dimaksud akan lebih mengarahkan peneliti untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Dari pemaparan tersebut maka dapat dibuat kerangka pikir penelitian sebagaimana pada gambar berikut.

Variabel pertumbuhan ekonomi (X1), variabel investasi (X2) dan variabel upah minimum kabupaten/kota (X3) diindikasikan dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan (Y) berdasarkan teori dan studi empiris yang telah dipaparkan.



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian pada **Gambar 2.1** maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh signifikan ketimpangan pendapatan.
2. Diduga investasi dapat berpengaruh signifikan ketimpangan pendapatan.
3. Diduga upah minimum kabupaten/kota dapat berpengaruh signifikan ketimpangan pendapatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian ini mencakup faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Jawa barat. Luas cakupan pada penelitian ini adalah 27 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2017-2021.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data kuantitatif yang terdiri dari Koefisien Gini Tahun 2017-2021, laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tahun 2017-2021, investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tahun 2017-2021 dan upah minimum kabupaten/kota tahun 2017-2021 di Provinsi Jawa Barat.

Data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) serta *website* resmi Jabarprov.go.id yang berupa data panel, yaitu gabungan dari data *cross section* dan *time series*. Untuk data *cross*

section menggunakan data dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sedangkan data *time series* menggunakan data dari Tahun 2017-2021.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data riset kepustakaan (*library research*). Riset kepustakaan yaitu pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan penulisan melalui literatur atau atau referensi kepustakaan. Beberapa sumber yang dimaksud seperti perpustakaan, jurnal, *website* Badan Pusat Statistik (BPS) dan Jabarprov.go serta berbagai sumber penerbitan seperti buku-buku ekonomi yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri data-data informasi yang berkaitan dengan obyek studi.

3.5 Model Analisis Data

Model analisis yang akan digunakan untuk menganalisis Ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2017-2021 adalah regresi data panel. Variabel yang akan diteliti terdiri dari variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas (*independent variable*) terdiri dari pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan ekonomi), investasi dan upah minimum kabupaten/kota.

Sedangkan variabel terikat (*dependent variable*) adalah ketimpangan pendapatan (indeks gini). Dalam penelitian ini pengujian menggunakan

software computer E-views10 dan pembahasan analisis secara deskriptif. Ketimpangan pendapatan di Jawa Barat dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi dan fungsinya ditunjukkan sebagai berikut.

$$Y = f (X_1, X_2, X_3) \dots\dots\dots(1)$$

$$Y = \alpha, X_{1it}^{\beta_1}, X_{2it}^{\beta_2}, X_{3it}^{\beta_3}, e \dots\dots\dots(2)$$

sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut.

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \ln\beta_2 X_{2it} + \ln\beta_3 X_{3it} + e \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan :

Y = Ketimpangan pendapatan (Indeks)

X_1 = Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)

X_2 = Investasi (Milliar Rupiah)

X_3 = Upah Minimum (Juta Rupiah)

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

i = Data *Cross Section* kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat

t = Data *Time Series*, tahun 2017-2021

e = *error term*

3.6 Uji Asumsi Klasik

Pada regresi data panel, perlu dilakukan pengujian untuk asumsi klasik, yaitu:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji model regresi penelitian variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi yaitu uji normalitas data populasi. Hasil uji normalitas yang baik adalah bentuk distribusi normal atau mendekati normal. Menurut Ghozali (2013), data terdistribusi normal apabila:

- a. Apabila nilai probabilitas $>$ dari 0,05 maka data terdistribusi secara normal.
- b. Apabila nilai probabilitas $<$ dari 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan situasi yang menunjukkan adanya hubungan kuat antara variabel independen dalam sebuah model regresi berganda. Pada pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Menurut Ghozali (2013) kriteria pengambilan keputusan terkait uji multikolinearitas adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai VIF $<$ 10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.
- b. Jika nilai VIF $>$ 10 maka dinyatakan terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dasar pengambilan keputusan adalah dengan melihat angka probabilitas dari statistik uji glesjer. Menurut Ghozali (2013) Untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas dalam data panel, dapat digunakan dengan kriteria:

- a. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
- b. Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Apabila residual mengalami autokorelasi, dilakukan estimasi dengan *Generalized Linear Square* (GLS). Dengan Uji Breusch-Godfrey memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas Chi. Squared $> 0,05$ maka tidak terjadi gejala autokorelasi

- b. Jika nilai probabilitas Chi. Squared $< 0,05$ maka terjadi gejala autokorelasi

3.7 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik untuk menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan penelitian.

3.7.1 Uji Statistik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen serta meneliti signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun secara simultan. Uji ini meliputi Uji F, Uji t dan Uji Koefisien Determinan (R^2).

1. Uji F

Uji statistik F bertujuan untuk melihat apakah sebuah variabel bebas yang dimasukkan akan memiliki pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel terikat atau tidak. Uji F statistik secara umum menggunakan tingkat signifikansi atau alpha (α) 0,05 (5%). Menurut Ghozali (2013), adapun kriteria dari uji F yaitu sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas $< 0,05$, artinya semua variabel independent/bebas memiliki pengaruh terhadap variabel dependen/terikat. Sehingga model yang digunakan *fit* (model sesuai).
- b. Jika nilai probabilitas $> 0,05$, artinya semua variabel independent/bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen/terikat. Sehingga model yang digunakan tidak *fit* (model tidak sesuai).

2. Uji t

Uji statistik t menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Menurut Ghozali (2013) penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut.

- a. Bila nilai probabilitas $< 0,05$, artinya dapat mempengaruhi variabel dependen dari salah satu variabel independen.
- b. Bila nilai probabilitas $> 0,05$ artinya tidak dapat mempengaruhi variabel dependen dari salah satu variabel independen.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan untuk mengetahui besarnya proporsi sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Ghazali (2013) nilai koefisien determinasi berkisar antara nilai 0 dan 1. Jika nilai R square (R^2) = 1 maka dapat diartikan bahwa garis regresi dari sebuah model memberikan sumbangan sebesar 100 persen terhadap variabel dependen. Adapun jika nilai R square (R^2) = 0 maka dapat diartikan bahwa garis regresi dari sebuah model tidak akan mempengaruhi terhadap perubahan variabel dependen.

3.8 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah batasan-batasan yang dipakai dalam penulisan untuk menghindari adanya interpretasi diluar dari variabel yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan antar penduduk kabupaten/kota dalam Provinsi yang sama dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, diukur dengan indeks gini (Indeks).

2. Pertumbuhan ekonomi adalah semua tambahan barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama jangka waktu tertentu (Persen).
3. Investasi adalah salah satu sumber data strategis untuk memetakan dan mengetahui potensi investasi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan pendapatan perkapita (Milliar Rupiah).
4. Upah minimum adalah standar bayaran kepada tenaga kerja oleh pelaku industri di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat untuk mencegah kemiskinan di antara pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Juta Rupiah).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Gambaran umum suatu wilayah penelitian adalah perspektif ruang (regional dan spasial) dimana penelitian berkaitan dengan suatu wilayah geografis.

4.1.1 Keadaan Geografis Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat terletak di ujung barat Pulau Jawa dengan posisi geografis antara $113^{\circ}48'10''$ - $113^{\circ}48'26''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}50'10''$ - $7^{\circ}56'41''$ Lintang Selatan. Jawa Barat adalah sebuah Provinsi dengan IbuKota Bandung, wilayahnya terletak di sebelah utara Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta dan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia serta di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.

Jawa Barat memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, iklim yang demikian didukung oleh adanya tanah yang subur dari endapan vulkanik serta banyaknya sungai yang mengalir sehingga sebagian besar tanahnya digunakan untuk pertanian dan wilayah Jawa Barat meliputi $29.275,98 \text{ km}^2$ dimana luas wilayah Provinsi Jawa Barat adalah $35.377,76 \text{ km}^2$, berarti sebagian besar lahan digunakan untuk pertanian dan memiliki kawasan hutan

berfungsi sebagai hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi dengan proporsi 22,10% dari total luas wilayah Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat memiliki 18 kabupaten dan 9 kota, terdiri dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi terpadat di Indonesia, dengan sebagian besar wilayahnya padat penduduk dan jumlah penduduk terbesar berada di Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk 5,71 juta jiwa dan jumlah penduduk terkecil di Jawa Barat adalah Kota Banjar dengan jumlah penduduk 182 ribu jiwa.

4.2 Perkembangan Variabel Penelitian

Sub bab ini memberikan gambaran tentang data koefisien gini, laju pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun terakhir.

4.2.1 Perkembangan Data Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021

Mengukur ketimpangan distribusi pendapatan dengan indeks gini, klasifikasi tingkat koefisien gini adalah ukuran total ketidakmerataan pendapatan suatu wilayah yang berkisar antara 0-1 semakin mendekati 1 maka diindikasikan semakin timpang, semakin mendekati 0 maka semakin merata distribusi pendapatan.

Perbedaan pendapatan yang diukur dengan indeks gini merupakan persoalan yang tidak dapat dihindari selama masih ada perbedaan keterampilan dan faktor yang mempengaruhi. Upaya mengurangi ketimpangan yang berlebihan melalui pengelolaan faktor dan sumber daya daerah secara optimal. Dengan demikian menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik yang juga disertai dengan distribusi pendapatan yang baik. Jumlah pendapatan yang diterima kelompok masyarakat atau rumah tangga ditentukan oleh kemampuan masing-masing, yang memiliki keterampilan berbeda satu sama lain. Perbedaan ini disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi. Perhitungan indeks gini didasarkan pada kurva Lorenz untuk mengetahui besarnya kontribusi ketidakmerataan tiap kelompok pendapatan, hal ini dilakukan untuk mengetahui besarnya kontribusi ketidakmerataan tiap kelompok pendapatan.

Berikut disajikan dalam tabel 4.1 indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

Tabel 4.1
Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017- 2021 (Indeks)

Kabupaten/ Kota	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Bogor	0,38	0,416	0,404	0,381	0,396	0,395
Sukabumi	0,33	0,329	0,347	0,334	0,343	0,337
Cianjur	0,35	0,37	0,363	0,35	0,372	0,361
Bandung	0,39	0,418	0,355	0,414	0,386	0,393
Garut	0,37	0,371	0,352	0,352	0,322	0,353
Tasikmalaya	0,32	0,353	0,322	0,343	0,378	0,343
Ciamis	0,36	0,309	0,354	0,336	0,342	0,340
Kuningan	0,32	0,397	0,435	0,361	0,349	0,372
Cirebon	0,36	0,364	0,344	0,338	0,339	0,349
Majalengka	0,35	0,365	0,347	0,336	0,354	0,350
Sumedang	0,39	0,42	0,344	0,384	0,359	0,379
Indramayu	0,29	0,316	0,284	0,319	0,321	0,306
Subang	0,34	0,334	0,333	0,35	0,329	0,337
Purwakarta	0,39	0,397	0,399	0,414	0,388	0,398
Karawang	0,35	0,331	0,357	0,327	0,374	0,348
Bekasi	0,34	0,356	0,354	0,372	0,34	0,352
Bandung Barat	0,41	0,394	0,362	0,376	0,356	0,380
Pangandaran	0,35	0,303	0,31	0,335	0,32	0,324
Kota Bogor	0,41	0,389	0,386	0,412	0,441	0,408
Kota Sukabumi	0,4	0,41	0,419	0,397	0,436	0,412
Kota Bandung	0,43	0,423	0,442	0,402	0,427	0,425
Kota Cirebon	0,41	0,432	0,408	0,421	0,489	0,432
Kota Bekasi	0,35	0,336	0,352	0,352	0,401	0,358
Kota Depok	0,35	0,365	0,344	0,344	0,367	0,354
Kota Cimahi	0,37	0,364	0,437	0,38	0,415	0,393
Kota Tasikmalaya	0,42	0,39	0,36	0,366	0,414	0,390
Kota Banjar	0,38	0,322	0,302	0,312	0,341	0,331

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 4.1, menunjukkan bahwa Kota Cirebon memiliki rata-rata pertumbuhan indeks gini terbesar yaitu 0,432 berada diatas, Kota Bandung

0,425, Kota Sukabumi 0,412, Kota Bogor 0,408, Kabupaten Purwakarta 0,398, Kabupaten Bogor 0,395, Kabupaten Bandung 0,393, Kota Cimahi 0,393 dan Kota Tasikmalaya 0,390. Nilai tersebut bahkan berada diatas indeks gini secara nasional yaitu sebesar 0,388.

Data tersebut menunjukkan bahwa indeks gini yang cenderung meningkat selama 5 tahun terakhir antar kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat mengindikasikan bahwa besarnya gap/ jarak didalam/ antar masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Merujuk dari data publikasi BPS bahwa selama 5 tahun terakhir bahwa Provinsi Jawa Barat tidak pernah keluar dari 10 Provinsi yang memiliki indeks gini tertinggi se Indonesia dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah setempat belum efektif dalam mengatasi pemerataan pendapatan.

4.2.2 Perkembangan Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

Pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yang diciptakan/ *output* pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai pada tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi ekonomi suatu daerah yang didefinisikan sebagai pertumbuhan PDB/ PDRB dari tahun ke tahun. Berikut data laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

Tabel 4.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017-2021(Persen)

Kabupaten/ Kota	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Bogor	5,92	6,19	5,85	-1,76	3,55	3,95
Sukabumi	5,75	5,81	5,64	-0,91	3,74	4,01
Cianjur	5,77	6,24	5,67	-0,77	3,48	4,08
Bandung	6,15	6,26	6,36	-1,8	3,56	4,11
Garut	4,91	4,96	5,02	-1,26	3,58	3,44
Tasikmalaya	5,95	5,7	5,43	-0,98	3,43	3,91
Ciamis	5,21	5,31	5,38	-0,14	3,66	3,88
Kuningan	6,36	6,43	6,59	0,11	3,56	4,61
Cirebon	5,06	5,02	4,68	-1,08	2,47	3,23
Majalengka	6,81	6,48	7,77	0,89	4,75	5,34
Sumedang	6,23	5,79	6,33	-1,12	3,17	4,08
Indramayu	1,43	1,34	3,2	-1,58	0,58	0,99
Subang	5,1	4,41	4,61	-1,15	2,18	3,03
Purwakarta	5,15	4,98	4,37	-2,13	3,42	3,16
Karawang	5,13	6,04	4,21	-3,8	5,85	3,49
Bekasi	5,68	6,02	3,95	-3,39	3,62	3,18
Bandung Barat	5,21	5,5	5,05	-2,41	3,46	3,36
Pangandaran	5,1	5,32	5,94	-0,05	3,67	4,00
Kota Bogor	6,12	6,14	6,19	-0,41	3,76	4,36
Kota Sukabumi	5,43	5,52	5,53	-1,49	3,71	3,74
Kota Bandung	7,21	7,08	6,79	-2,28	3,76	4,51
Kota Cirebon	5,8	6,2	6,29	-0,98	3,05	4,07
Kota Bekasi	5,73	5,86	5,41	-2,58	3,22	3,53
Kota Depok	6,75	6,97	6,74	-1,92	3,76	4,46
Kota Cimahi	5,43	6,46	7,85	-2,26	4,19	4,33
Kota Tasikmalaya	6,07	5,93	5,97	-2,01	3,57	3,91
Kota Banjar	5,3	5,05	5,03	0,94	3,49	3,96

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 4.2, menunjukkan bahwa perkembangan laju pertumbuhan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat memiliki nilai yang cenderung meningkat terkecuali pada tahun 2020 dikarenakan pandemi covid-19 yang

menyebabkan hampir seluruh wilayah di Indonesia terjadi kelumpuhan perekonomian.

Berdasarkan data tersebut menyatakan bahwa Kabupaten Majalengka memiliki rata-rata laju pertumbuhan yang paling tinggi selama 5 tahun terakhir dengan nilai 5,34%, diikuti dengan Kabupaten Kuningan sebesar 4,61%, Kota Bandung 4,51%, Kota Depok 4,46%, Kota Bogor 4,36%, dan Kabupaten Bandung sebesar 4,11%. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pemerataan pendapatan. Dengan kondisi pemerataan pendapatan, maka secara efektif akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran penduduk daerah tersebut karena akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap barang maupun jasa.

4.2.3 Perkembangan Data Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2017-2021

Investasi merupakan penunjang di masa yang akan datang, yang biasanya dilakukan penanaman modal pada awal dan akan berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian sekitar. Investasi memiliki banyak jenis, salah satunya investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Berikut disajikan data investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

Tabel 4.3
Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/ Kota	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Bogor	31.276,73	33.595,98	35.316,75	32.780,31	34.966,06	33.587,17
Sukabumi	13.774,55	14.773,20	16.173,16	17.383,11	19.249,41	16.270,69
Cianjur	7.245,31	7.785,15	8.318,08	8.607,82	7.936,98	7.978,67
Bandung	6.155,70	6.588,32	6.963,87	6.529,16	7.009,19	6.649,25
Garut	9.445,06	9.968,38	10.357,26	9.525,33	10.194,86	9.898,18
Tasikmalaya	4.433,46	4.750,10	5.028,16	4.800,18	5.095,84	4.821,55
Ciamis	5.327,30	5.620,82	5.276,68	5.557,81	5.586,09	5.473,74
Kuningan	3.820,41	4.130,51	4.330,85	4.030,59	4.299,56	4.122,38
Cirebon	10.196,70	10.671,19	11.078,32	10.093,69	10.488,74	10.505,73
Majalengka	7.261,93	7.586,00	7.848,00	7.463,00	7.980,00	7.627,79
Sumedang	7.308,03	8.159,70	8.766,23	8.156,57	8.978,87	8.273,88
Indramayu	8.348,32	8.888,14	9.258,97	8.526,74	9.162,81	8.837,00
Subang	6.915,76	7.311,36	7.522,52	6.911,88	7.402,14	7.212,73
Purwakarta	10.521,10	10.752,10	11.002,32	10.086,52	10.705,18	10.613,44
Karawang	25.874,16	26.591,11	27.031,63	24.206,70	25.791,03	25.898,93
Bekasi	46.995,21	50.956,00	52.360,95	45.008,74	48.558,99	48.775,98
Bandung Barat	6.155,70	6.588,32	6.963,87	6.529,16	7.009,19	6.649,25
Pangandaran	1.770,82	1.776,08	1.844,43	1.684,38	1.780,82	1.771,31
Kota Bogor	10.204,41	10.721,05	11.293,06	10.482,87	11.357,96	10.811,87
Kota Sukabumi	1.701,01	1.875,02	2.034,34	1.913,68	2.122,79	1.929,37
Kota Bandung	49.748,51	53.030,61	55.371,02	49.976,88	52.725,06	52.170,42
Kota Cirebon	4.302,33	4.546,71	4.685,81	4.456,28	4.533,55	4.504,94
Kota Bekasi	23.386,14	24.667,90	22.398,37	23.406,33	23.811,30	23.534,01
Kota Depok	21.769,17	23.947,91	25.214,42	24.317,22	25.677,32	24.185,21
Kota Cimahi	6.846,37	7.284,43	7.574,12	7.033,98	7.522,03	7.252,19
Kota Tasikmalaya	4.089,37	4.443,46	4.479,10	4.800,18	5.095,88	4.581,60
Kota Banjar	886,84	949,26	1.000,03	943,91	1.013,64	958,74

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa Kota Bandung memiliki rata-rata pertumbuhan investasi PMTB yang paling besar selama 5 tahun terakhir sebesar Rp. 52.725,06 miliar, diikuti Kabupaten Bekasi Rp. 48.558,99 miliar dan Kabupaten Bogor sebesar Rp. 34.996,06 miliar.

Perbedaan data tersebut cukup timpang di berbagai daerah di Jawa Barat karena banyak daerah di Jawa Barat memiliki nilai yang sangat jauh dari nilai tertinggi.

4.2.4 Perkembangan Data Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021

Upah minimum adalah standar minimum yang digunakan oleh pemberi kerja atau pelaku dalam suatu industri untuk memberikan upah kepada pekerja, sesuai dalam peraturan pemerintah tentang pengupahan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja: PER/MEN/No.18 tahun 2022, tentang upah minimum.

Kenaikan upah minimum dapat mempengaruhi lulusan untuk memasuki pasar tenaga kerja dan secara langsung akan meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), namun jika kenaikan TPAK tidak diikuti dengan peningkatan ekonomi juga akan menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Namun peningkatan upah minimum akan mempengaruhi kesejahteraan pekerja, sehingga mereka termotivasi untuk meningkatkan produktivitas dan akan meningkatkan daya serap perusahaan/ pelaku industri terhadap penggunaan tenaga kerja. Berikut telah disajikan data upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

Tabel 4.4
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017-2021

Kabupaten/kota	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Bogor	3.204.551	3.483.667	3.763.405	4.083.670	4.217.206	3.750.500
Sukabumi	2.376.558	2.583.556	2.791.016	3.028.531	3.125.444	2.781.021
Cianjur	1.989.115	2.162.366	2.336.004	2.534.798	2.534.798	2.311.416
Bandung	2.463.461	2.678.028	3.339.580	3.139.275	3.241.929	2.972.455
Garut	1.538.909	1.672.947	1.807.285	1.961.085	1.961.085	1.788.262
Tasikmalaya	1.767.686	1.920.937	2.075.189	2.251.787	2.251.787	2.053.477
Ciamis	1.475.792	1.604.334	1.733.162	1.880.654	1.880.654	1.714.919
Kuningan	1.477.352	1.606.030	1.734.994	1.882.642	1.882.642	1.716.732
Cirebon	1.723.578	1.873.701	2.024.160	2.196.416	2.269.556	2.017.482
Majalengka	1.525.632	1.653.514	1.791.693	1.944.166	2.009.000	1.784.801
Sumedang	2.463.461	2.678.028	2.893.074	3.139.275	3.241.929	2.883.153
Indramayu	1.803.239	1.960.301	2.117.713	2.297.931	2.373.073	2.110.451
Subang	2.327.072	2.529.759	2.732.899	2.965.468	3.064.218	2.723.883
Purwakarta	3.169.549	3.445.616	3.722.299	4.039.067	4.173.568	3.710.020
Karawang	3.605.272	3.919.291	4.234.010	4.549.324	4.798.312	4.221.242
Bekasi	3.530.438	3.837.939	4.229.756	4.498.961	4.791.843	4.177.787
Bandung Barat	2.468.289	2.683.277	2.898.744	3.145.427	3.248.283	2.888.804
Pangandaran	1.433.901	1.558.793	1.714.673	1.860.591	1.860.591	1.685.710
Kota Bogor	3.272.143	3.557.146	3.842.785	4.169.806	4.169.806	3.802.337
Kota Sukabumi	1.985.494	2.158.430	2.331.752	2.530.182	2.530.182	2.307.208
Kota Bandung	2.843.662	3.091.345	3.339.580	3.623.778	3.742.276	3.328.128
Kota Cirebon	1.741.682	1.893.383	2.054.422	2.219.487	2.269.556	2.035.706
Kota Bekasi	3.601.650	3.915.353	4.229.756	4.589.708	4.782.935	4.223.880
Kota Depok	3.297.489	3.584.700	3.872.551	4.202.105	4.339.514	3.859.272
Kota Cimahi	2.463.461	2.678.028	2.893.074	3.139.274	3.241.929	2.883.153
Kota Tasikmalaya	1.776.686	1.920.937	2.086.529	2.264.093	2.264.093	2.062.468
Kota Banjar	1.437.522	1.562.730	1.688.217	1.831.884	1.831.884	1.670.447

Sumber : Jabarprov.go.id

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa Kota Bekasi memiliki rata-rata pertumbuhan upah minimum selama 5 tahun terakhir yang paling besar yaitu

Rp. 4.223.880,- diikuti Kabupaten Karawang sebesar Rp. 4.221.242,-, Kabupaten Bekasi Rp. 4.177.787,-, Kota Depok Rp. 3.859.272,-, Kota Bogor Rp. 3.802.337,-, dan Kota Bandung Rp. 3.328.128 serta kabupaten/kota lainnya berkisar Rp. 1.600.000 – Rp. 2.000.000,-.

Berdasarkan data tersebut, upah minimum per kabupaten/kota di Jawa Barat sangat timpang, ada wilayah yang memiliki rata-rata upah minimum selama 5 tahun terakhir hampir menyentuh angka Rp. 5.000.000,- tetapi ada juga wilayah yang hanya memiliki rata-rata upah minimum yang hanya hampir Rp. 2.000.000,- maka dapat diindikasikan bahwa pemerintah wilayah memperhatikan secara betul tentang kesejahteraan para pekerja dengan menaikkan tingkat upah minimum dari tahun ke tahun.

4.3 Hasil Estimasi

Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, maka dilakukan analisis regresi linear berganda yang mengestimasi besarnya pengaruh. Pada regresi linear berganda, yang menjadi variabel endogen/ dependen adalah Ketimpangan Pendapatan (Y_1) sedangkan variabel eksogen/ independen yaitu Laju pertumbuhan ekonomi (X_1), Investasi (X_2) dan Upah minimum (X_3).

4.3.1 Uji Model Regresi Data Panel

Pada model Regresi data panel, dilakukan pemilihan pengujian regresi

berbagai model.

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM) yang akan digunakan. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.

- a) H0: Model CEM lebih baik dibandingkan model FEM.
- b) H1: Model FEM lebih baik dibandingkan model CEM.

Aturan dalam pengambilan keputusan terhadap hipotesis sebagai berikut.

1. Jika nilai probabilitas cross section fixed effects $< 0,05$, maka H0 ditolak dan H1 diterima.
2. Jika nilai probabilitas cross section fixed effects $\geq 0,05$, maka H0 diterima dan H1 ditolak.

Tabel 4.5
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: PANEL
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8.957939	(26,105)	0.0000
Cross-section Chi-square	157.789168	26	0.0000

Sumber : Olah Data Eviews10

Berdasarkan hasil uji Chow pada tabel 4.5, diketahui nilai probabilitas adalah 0,0000. Karena nilai probabilitas $< 0,05$, maka H0 ditolak dan H1

diterima, dengan kata lain maka model estimasi yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

2. Uji Hausman

Uji Hausman setelah selesai melakukan uji Chow dengan hasil probabilitas sebesar $0,0000 \leq 0,05$ maka selanjutnya dilakukan uji Hausman yang bertujuan untuk menentukan model mana yang lebih tepat, *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM), dengan hipotesis yang diuji sebagai berikut.

- a) H0 : Model REM lebih baik dibandingkan model FEM.
- b) H1: Model FEM lebih baik dibandingkan model REM.

Aturan dalam pengambilan keputusan terhadap hipotesis sebagai berikut.

1. Jika nilai probabilitas chi square $< 0,05$, maka H0 ditolak dan H1 diterima.
2. Jika nilai probabilitas chi square $> 0,05$, maka H0 diterima dan H1 ditolak.

Tabel 4.6
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: PANEL
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.840782	3	0.1196

Sumber : *Olah Data Eviews10*

Setelah dilakukan uji Hausman tidak tolak H₀ dan kesimpulan *random*

effect model lebih baik dari *fixed effect model* karena $\text{prob.} = 0,1196 > 0,05$.

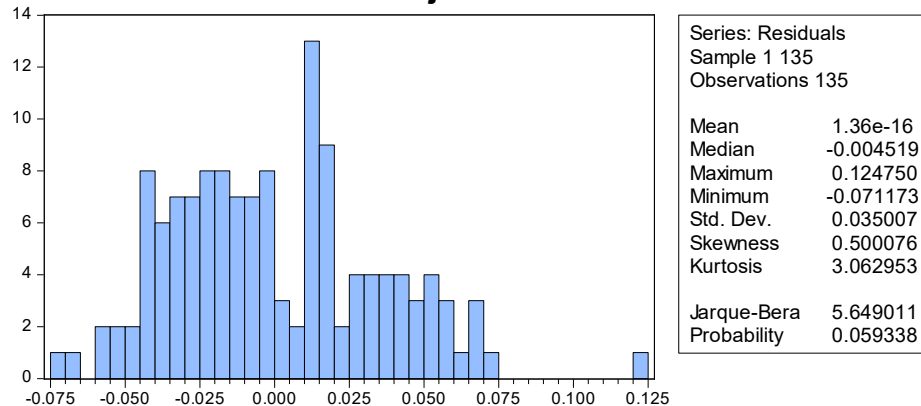
Dari kedua uji tersebut maka dipilih *Random Effect Model* (REM) sebagai model yang terbaik secara statistik. Tetapi jika dilihat dari kriteria GoF (banyak variabel yang signifikan dan *r square*) model random tidak baik karena nilai adjusted R squarenya sangat kecil dan tidak ada variabel yang signifikan, maka hasil model terpilih tidak langsung diintrepetasikan, akan tetapi dilakukan uji asumsi klasik. Jika semua asumsi terpenuhi maka model terpilih yang dihasilkan dapat langsung diintrepetasikan, tetapi jika tidak maka dilakukan transformasi model terpilih lalu diintrepetasikan.

4.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual menggunakan uji JarqueBera (J-B), dengan tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,05.

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Olah Data Eviews10

Berdasarkan gambar 4.1 diketahui nilai dari probabilitas Jarque-Bera adalah 0,059338 memiliki nilai $> 0,05$. Hal ini berarti asumsi normalitas terpenuhi.

2. Uji Multikolinearitas

Dalam pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *centered VIF*. Berikut hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
PERTUMBUHAN_EKONOMI	1.082326
LN_INVESTASI	2.134522
LN_UPAH	2.225859

Sumber : Olah Data Eviews10

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai VIF (*centered VIF*) < 10 . Oleh karena itu dari hasil pengujian multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Dasar pengambilan keputusan adalah dengan melihat angka probabilitas dari statistik uji White. Berikut merupakan hasil dari uji heteroskedestisitas.

Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	0.919532	Prob. F(3,131)	0.4334
Obs*R-squared	2.784199	Prob. Chi-Square(3)	0.4261
Scaled explained SS	2.394597	Prob. Chi-Square(3)	0.4946

Sumber : Olah Data Eviews10

Hasil uji heteroskedestisitas pada tabel 4.8 menunjukkan hasil bahwa nilai probabilitas F sebesar $0,4261 > 0,05$ maka asumsi heteroskedastisitas tidak terjadi.

4. Uji Autokorelasi

Nilai statistik dari uji ini dengan menggunakan nilai prob. chi square.

Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	28.84645	Prob. F(2,129)	0.0000
Obs*R-squared	41.71847	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Sumber : Olah Data Eviews10

Hasil tabel 4.9 belum bebas autokorelasi, menurut Nachrowi (2006) autokorelasi dapat diatasi dengan metode *Generalized Least Squared* (GLS) dan *White Cross Section*. Dapat disimpulkan bahwa hanya terjadi pelanggaran asumsi autokorelasi

sehingga akan digunakan *Common Effect Model* (CEM) sesuai dengan asas parsimony dalam statistik *Common Effect Model* dapat menjadi pertimbangan alternatif dengan dilakukan GLS dan *White Cross Section*.

4.3.3 Hasil Uji Statistik

Analisis Regresi Linear Berganda berfungsi untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh x dan y yang diproyeksikan dengan model regresi berdasarkan tabel berikut.

Tabel 4.10
Analisis Regresi Variabel Koefisien

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.029056	0.041287	0.703760	0.4828
PERTUMBUHAN_EKONOMI	0.002712	0.000606	4.479063	0.0000
LN_INVESTASI	-0.010605	0.002381	-4.454879	0.0000
LN_UPAH	0.053711	0.007371	7.286791	0.0000

Sumber : Olah Data Eviews10

Dari hasil di atas diperoleh persamaan:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \ln\beta_2 X_{2it} + \ln\beta_3 X_{3it} + e$$

Transformasi Angka

$$Y_{it} = 0,290 + 0,002 X_1 - 0,010 X_2 + 0,0537 X_3 + e$$

Y = Ketimpangan pendapatan (Indeks Gini)

α = Konstanta

X_1 = Pertumbuhan ekonomi

X_2 = Investasi

X_3 = Upah minimum

e = Error term

Berdasarkan model persamaan tersebut, nilai konstanta (α) sebesar (0,290) artinya jika variabel pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah minimum kabupaten/kota adalah konstan (0), maka ketimpangan pendapatan sama dengan konstanta.

1. Uji F

Pengujian hipotesis ini sering disebut dengan pengujian signifikansi keseluruhan terhadap regresi yang ingin menguji apakah Y secara linear berhubungan.

- a) Nilai probabilitas $F < 0,05$ variabel independen secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen
- b) Nilai probabilitas $F > 0,05$ variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.11
Hasil Uji F

R-squared	0.248550	Mean dependent var	0.488578
Adjusted R-squared	0.231341	S.D. dependent var	0.256329
S.E. of regression	0.035117	Sum squared resid	0.161549
F-statistic	14.44323	Durbin-Watson stat	1.738164
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Olah Data Eviews10

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.11 maka dengan probabilitas (F-statisic) sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan variabel bebas dapat secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).

2. Uji t

Uji parsial (Uji-t) digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel X (variabel bebas) terhadap (Y).

- a) Nilai probabilitas $t < 0,05$ maka variabel X (independen) memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel Y (dependen).
- b) Nilai probabilitas $t > 0,05$ maka variabel X (independen) tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y (dependen)

Tabel 4.12
Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.029056	0.041287	0.703760	0.4828
PERTUMBUHAN_EKONOMI	0.002712	0.000606	4.479063	0.0000
LN_INVESTASI	-0.010605	0.002381	-4.454879	0.0000
LN_UPAH	0.053711	0.007371	7.286791	0.0000

Sumber : Olah Data Eviews10

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.12 uji t dapat disimpulkan bahwa.

1. Variabel X_1 memiliki nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (X_1) berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan (Y).

2. Variabel X_2 memiliki nilai probabilitas $0,000 <$ dari $0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel investasi (X_2) berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan (Y).
3. Variabel X_3 memiliki nilai probabilitas $0,000$ dimana $<$ dari $0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel upah minimum (X_3) berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan (Y).

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Merupakan suatu nilai yang mengukur seberapa berpengaruh variabel-variabel independen yang digunakan pada persamaan regresi, dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antar 0-1.

Tabel 4.13
Hasil Uji R^2

R-squared	0.248550	Mean dependent var	0.488578
Adjusted R-squared	0.231341	S.D. dependent var	0.256329
S.E. of regression	0.035117	Sum squared resid	0.161549
F-statistic	14.44323	Durbin-Watson stat	1.738164
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Olah Data Eviews10

Berdasarkan Tabel 4.13, Nilai R square sudah di Atas 20 persen lebih. Sehingga model dianggap sudah cukup baik. Jika dilihat pada diatas yaitu hasil koefisien determinasi, nilai *R Square* sebesar 0,2485. Sehingga hal ini memperlihatkan bahwa variabel independen secara total mampu menjelaskan variasi dan berkontribusi terhadap variabel dependen/gini

rasio yaitu sebesar 24,85 persen dan sisanya oleh variabel lain di luar model.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian merupakan interpretasi yang dibuktikan sebelumnya dalam bentuk statistik/ yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan pada penelitian. Analisis ketimpangan pendapatan, diperoleh temuan sebagai berikut.

4.4.1 Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai koefisiennya adalah 0,002 yaitu jika pertumbuhan ekonomi meningkat 1% maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan/ indeks gini sebesar 0,002 kali. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif. Hal ini dikarenakan laju pertumbuhan ekonomi pada tabel 4.1 dan indeks gini pada tabel 4.2, menjelaskan nilai yang cenderung meningkat. sehingga teori kuznet pada penelitian ini valid.

Menurut Todaro (2003), pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada fase pembangunan dapat diikuti oleh masalah ekonomi, kemiskinan hingga ketimpangan pendapatan karena tahapan pertumbuhan awal akan terpusat di

sektor industri modern yang mempunyai lapangan kerja terbatas namun tingkat upah dan produktivitas terhitung tinggi.

Provinsi Jawa Barat belum menunjukkan pertumbuhan yang inklusif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, dimana pertumbuhan inklusif menitikberatkan salah satunya pada aspek pemerataan. Terlihat pada tabel 4.1 bahwa laju pertumbuhan ekonomi juga tidak mencerminkan kesejahteraan secara nyata, dimana tiap kabupaten/kota memiliki nilai yang cukup timpang.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh F. Ramadhan (2017) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen, yaitu pertumbuhan ekonomi, belanja daerah dan IPM berdampak positif terhadap kesenjangan pendapatan antar daerah. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis Kuznet valid dalam penelitian ini. Hal ini tercermin dari hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.

4.4.2 Analisis Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021

Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai koefisiennya adalah (-0,010) yaitu jika investasi meningkat 1% maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan/ indeks gini sebesar 0,010 kali. Hal tersebut sesuai dengan

hipotesis bahwa hubungan investasi dengan ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan.

Sesuai dengan teori Harrod-Domar yang menerangkan bahwa naiknya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita naik karena adanya kegiatan-kegiatan produktif. Dengan persebaran dan kenaikan investasi maka akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian N. Hartini (2017) bahwa variabel investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

4.4.3 Analisis Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai koefisiennya adalah 0,053 yaitu jika upah minimum meningkat Rp. 1.000,- maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan/ indeks gini sebesar 0,053 kali. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa hubungan upah minimum dengan ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan. Data upah minimum pada tabel 4.4 dan indeks gini pada tabel 4.2, menjelaskan nilai yang cenderung meningkat.

Sesuai dengan teori neoklasik, upah minimum dapat meningkatkan daripada mengurangi ketimpangan pendapatan. Upah minimum menciptakan

peran non-pasar dalam menetapkan ambang batas upah minimum di pasar tenaga kerja, yang meningkatkan harga tenaga kerja. Jika harga tenaga kerja naik, upah minimum mengurangi permintaan tenaga kerja dan pekerja kehilangan pekerjaan.

Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian SN Sungkar (2015), dengan hasil yang menunjukkan bahwa kedua variabel dalam penelitian ini secara signifikan memiliki hubungan yang positif, yang artinya peningkatan upah minimum akan menaikkan angka kesenjangan pendapatan atau memperbesar kesenjangan pendapatan. Peningkatan upah minimum memperlebar kesenjangan antara pekerja terbawah dan menengah. Kenaikan upah minimum yang cenderung meningkatkan tingkat upah rata-rata tidak dirasakan oleh pekerja golongan upah terendah, dimana kelompok ini didominasi oleh pekerja pedesaan yang berpendidikan kurang dari sekolah dasar (SD).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian analisis ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil estimasi terdapat hasil bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan upah minimum kabupaten/kota berpengaruh secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan.
2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan secara parsial.
3. Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan secara parsial.
4. Upah minimum berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan secara parsial.

5.2 Saran

1. Pemerintah harus memahami potensi ekonomi masing-masing daerah untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi yang dapat digunakan sebagai dasar kemandirian ekonomi dan keuangan daerah serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tentunya harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, pendidikan dan kesehatan masyarakat serta gizi.

2. Perlu upaya peningkatan dan pemerataan investasi sehingga stok modal dapat dimanfaatkan dengan maksimal yang akan berdampak pada produktifitas perekonomian.
3. Pemerintah harus menganalisis secara komperhensif tentang kebijakan tingkat upah minimum agar tidak memberikan dampak negative terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelman, I. dan C.T. Morris (1973). *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*, Stanford CA : Standford University Press.
- Arsyad, Lincolin. (1999). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi keempat. STIE YKPN, Yogyakarta.
- Alifia Nadia Tsamara dan Prof. Dr. Agus Suman,, SE., DEA (2021). *Analisis Pengaruh Aglomerasi, Infrastruktur, Upah Minimum, Jumlah Orang Bekerja, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Jawa Timur*, Universitas Brawijaya.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2017-2020). *Laju Pertumbuhan Jawa Barat*. Jawa Barat.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2017-2020). *Indeks Gini Kabupaten/kota Jawa Barat*. Jawa Barat.
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2017-2020). *Tingkat Kemiskinan Kabupaten/kota Jawa Barat*. Jawa Barat.
- Fachrurrozi, K. (2014). *Pengaruh faktor sosial-ekonomi terhadap kriminalitas di Indonesia*. Universitas Syiah Kuala
- Febrianto, R. (2017). *Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Timur 2011-2015*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Universitas Brawijaya, 5(1), 1–13.
- Ghozali, Imam, 2013. *Aplikasi Analisa Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro
- HUMAS, JABAR. *Upah Minimum Kabupaten/kota Jabar 2017-2021*. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat | *Upah Minimum Kabupaten/kota di Daerah Provinsi Jawa Barat* (jabarprov.go.id), diakses pada 17 Desember 2022.
- Kanbur, R. (2010). "Inclusive Development: Two Papers on Conceptualization, Application and the ADB Perspective". Asian Development Bank, Manila
- Gregory, Mankiw N., (2000), *Teori Ekonomi Makro (Terjemahan)*, Edisi Keempat, Jakarta:Erlangga.

- M. Arif & Wicaksana (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor- faktor yang Mempengaruhinya, 323-328.
- Nachrowi, N. Djalal dan Hardius Usman (2006). Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan, Jakarta: LPFE Universitas Indonesia.
- N Hartini (2017). Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Yogyakarta Tahun 2011-2015. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nangarumba, M. (2015). Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 7(2), 9–26.
- NP Ningtyas (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Aglomerasi, Investasi, IPM terhadap ketimpangan pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Universitas Jember.
- Pendapatan, K., Daerah, D. I., & Yogyakarta, I. (2019). 282 | DINAMIC: Directory Journal of Economic Volume 1 Nomor 3 Tahun 2019. 1, 282–293.
- Sitti Holijah (2022). Pengaruh, A., Ekonomi, P., & Indeks, I. D. A. N.. Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Utara. 11(3).
- Rama, M. (2001). “The Consequences of Doubling the Minimum Wage”, *Industrial and Labour Relations Review*, Vol. 54, No. 4.
- Riandi, M., & Varlitya, C. R. (2020). Pengaruh Kemiskinan dan Upah Minimum Provinsi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera Indonesia. *Jurnal Ekombis*, 6(1), 57–68.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana.
- Sari Nurmalisa Sungkar; dkk. (2015). Pengaruh Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(2), 40–53.

- Syahri, D., & Gustiara, Y. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara Periode 2015-2019. 1(1), 34–43.
- Todaro, Michael P. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, edisi delapan. Jakarta : Erlangga, 2003.
- Todaro,MP. & Stephen C.S., (2008). Pembangunan Ekonomi. Edisi ke sembilan. Jakarta: Erlangga
- T. Nadhifah & M. Wibowo (2021). Determinan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 24, 39–52.
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. *Econometrica*, 48(4), 817–838.
- Waldman L. & Whalen C. (2007). University at Buffalo. The Minimum Wage is A Middle Class Issue. Vol. 50, issue 3. 59-71.
- Yoertiara, R. F., (2022). Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Pengaruh pertumbuhan ekonomi , IPM , dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan Provinsi-Provinsi di pulau Jawa. 1(1), 92–100.

LAMPIRAN

I. Rekapitulasi Data

1. Indeks Gini antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021 (Indeks).

Kabupaten/ Kota	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Bogor	0,38	0,416	0,404	0,381	0,396	0,395
Sukabumi	0,33	0,329	0,347	0,334	0,343	0,337
Cianjur	0,35	0,37	0,363	0,35	0,372	0,361
Bandung	0,39	0,418	0,355	0,414	0,386	0,393
Garut	0,37	0,371	0,352	0,352	0,322	0,353
Tasikmalaya	0,32	0,353	0,322	0,343	0,378	0,343
Ciamis	0,36	0,309	0,354	0,336	0,342	0,340
Kuningan	0,32	0,397	0,435	0,361	0,349	0,372
Cirebon	0,36	0,364	0,344	0,338	0,339	0,349
Majalengka	0,35	0,365	0,347	0,336	0,354	0,350
Sumedang	0,39	0,42	0,344	0,384	0,359	0,379
Indramayu	0,29	0,316	0,284	0,319	0,321	0,306
Subang	0,34	0,334	0,333	0,35	0,329	0,337
Purwakarta	0,39	0,397	0,399	0,414	0,388	0,398
Karawang	0,35	0,331	0,357	0,327	0,374	0,348
Bekasi	0,34	0,356	0,354	0,372	0,34	0,352
Bandung Barat	0,41	0,394	0,362	0,376	0,356	0,380
Pangandaran	0,35	0,303	0,31	0,335	0,32	0,324
Kota Bogor	0,41	0,389	0,386	0,412	0,441	0,408
Kota Sukabumi	0,4	0,41	0,419	0,397	0,436	0,412
Kota Bandung	0,43	0,423	0,442	0,402	0,427	0,425
Kota Cirebon	0,41	0,432	0,408	0,421	0,489	0,432
Kota Bekasi	0,35	0,336	0,352	0,352	0,401	0,358
Kota Depok	0,35	0,365	0,344	0,344	0,367	0,354
Kota Cimahi	0,37	0,364	0,437	0,38	0,415	0,393
Kota Tasikmalaya	0,42	0,39	0,36	0,366	0,414	0,390
Kota Banjar	0,38	0,322	0,302	0,312	0,341	0,331

2. Laju pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021 (Persen).

Kabupaten/ Kota	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Bogor	5,92	6,19	5,85	-1,76	3,55	3,95
Sukabumi	5,75	5,81	5,64	-0,91	3,74	4,01
Cianjur	5,77	6,24	5,67	-0,77	3,48	4,08
Bandung	6,15	6,26	6,36	-1,8	3,56	4,11
Garut	4,91	4,96	5,02	-1,26	3,58	3,44
Tasikmalaya	5,95	5,7	5,43	-0,98	3,43	3,91
Ciamis	5,21	5,31	5,38	-0,14	3,66	3,88
Kuningan	6,36	6,43	6,59	0,11	3,56	4,61
Cirebon	5,06	5,02	4,68	-1,08	2,47	3,23
Majalengka	6,81	6,48	7,77	0,89	4,75	5,34
Sumedang	6,23	5,79	6,33	-1,12	3,17	4,08
Indramayu	1,43	1,34	3,2	-1,58	0,58	0,99
Subang	5,1	4,41	4,61	-1,15	2,18	3,03
Purwakarta	5,15	4,98	4,37	-2,13	3,42	3,16
Karawang	5,13	6,04	4,21	-3,8	5,85	3,49
Bekasi	5,68	6,02	3,95	-3,39	3,62	3,18
Bandung Barat	5,21	5,5	5,05	-2,41	3,46	3,36
Pangandaran	5,1	5,32	5,94	-0,05	3,67	4,00
Kota Bogor	6,12	6,14	6,19	-0,41	3,76	4,36
Kota Sukabumi	5,43	5,52	5,53	-1,49	3,71	3,74
Kota Bandung	7,21	7,08	6,79	-2,28	3,76	4,51
Kota Cirebon	5,8	6,2	6,29	-0,98	3,05	4,07
Kota Bekasi	5,73	5,86	5,41	-2,58	3,22	3,53
Kota Depok	6,75	6,97	6,74	-1,92	3,76	4,46
Kota Cimahi	5,43	6,46	7,85	-2,26	4,19	4,33
Kota Tasikmalaya	6,07	5,93	5,97	-2,01	3,57	3,91
Kota Banjar	5,3	5,05	5,03	0,94	3,49	3,96

3. Data Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021. (Miliar Rupiah)

Kabupaten/ Kota	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Bogor	31.276,73	33.595,98	35.316,75	32.780,31	34.966,06	33.587,17
Sukabumi	13.774,55	14.773,20	16.173,16	17.383,11	19.249,41	16.270,69
Cianjur	7.245,31	7.785,15	8.318,08	8.607,82	7.936,98	7.978,67
Bandung	6.155,70	6.588,32	6.963,87	6.529,16	7.009,19	6.649,25
Garut	9.445,06	9.968,38	10.357,26	9.525,33	10.194,86	9.898,18
Tasikmalaya	4.433,46	4.750,10	5.028,16	4.800,18	5.095,84	4.821,55
Ciamis	5.327,30	5.620,82	5.276,68	5.557,81	5.586,09	5.473,74
Kuningan	3.820,41	4.130,51	4.330,85	4.030,59	4.299,56	4.122,38
Cirebon	10.196,70	10.671,19	11.078,32	10.093,69	10.488,74	10.505,73
Majalengka	7.261,93	7.586,00	7.848,00	7.463,00	7.980,00	7.627,79
Sumedang	7.308,03	8.159,70	8.766,23	8.156,57	8.978,87	8.273,88
Indramayu	8.348,32	8.888,14	9.258,97	8.526,74	9.162,81	8.837,00
Subang	6.915,76	7.311,36	7.522,52	6.911,88	7.402,14	7.212,73
Purwakarta	10.521,10	10.752,10	11.002,32	10.086,52	10.705,18	10.613,44
Karawang	25.874,16	26.591,11	27.031,63	24.206,70	25.791,03	25.898,93
Bekasi	46.995,21	50.956,00	52.360,95	45.008,74	48.558,99	48.775,98
Bandung Barat	6.155,70	6.588,32	6.963,87	6.529,16	7.009,19	6.649,25
Pangandaran	1.770,82	1.776,08	1.844,43	1.684,38	1.780,82	1.771,31
Kota Bogor	10.204,41	10.721,05	11.293,06	10.482,87	11.357,96	10.811,87
Kota Sukabumi	1.701,01	1.875,02	2.034,34	1.913,68	2.122,79	1.929,37
Kota Bandung	49.748,51	53.030,61	55.371,02	49.976,88	52.725,06	52.170,42
Kota Cirebon	4.302,33	4.546,71	4.685,81	4.456,28	4.533,55	4.504,94
Kota Bekasi	23.386,14	24.667,90	22.398,37	23.406,33	23.811,30	23.534,01
Kota Depok	21.769,17	23.947,91	25.214,42	24.317,22	25.677,32	24.185,21
Kota Cimahi	6.846,37	7.284,43	7.574,12	7.033,98	7.522,03	7.252,19
Kota Tasikmalaya	4.089,37	4.443,46	4.479,10	4.800,18	5.095,88	4.581,60
Kota Banjar	886,84	949,26	1.000,03	943,91	1.013,64	958,74

4. Upah minimum antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021. (Juta Rupiah)

Kabupaten/kota	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Bogor	3.204.551	3.483.667	3.763.405	4.083.670	4.217.206	3.750.500
Sukabumi	2.376.558	2.583.556	2.791.016	3.028.531	3.125.444	2.781.021
Cianjur	1.989.115	2.162.366	2.336.004	2.534.798	2.534.798	2.311.416
Bandung	2.463.461	2.678.028	3.339.580	3.139.275	3.241.929	2.972.455
Garut	1.538.909	1.672.947	1.807.285	1.961.085	1.961.085	1.788.262
Tasikmalaya	1.767.686	1.920.937	2.075.189	2.251.787	2.251.787	2.053.477
Ciamis	1.475.792	1.604.334	1.733.162	1.880.654	1.880.654	1.714.919
Kuningan	1.477.352	1.606.030	1.734.994	1.882.642	1.882.642	1.716.732
Cirebon	1.723.578	1.873.701	2.024.160	2.196.416	2.269.556	2.017.482
Majalengka	1.525.632	1.653.514	1.791.693	1.944.166	2.009.000	1.784.801
Sumedang	2.463.461	2.678.028	2.893.074	3.139.275	3.241.929	2.883.153
Indramayu	1.803.239	1.960.301	2.117.713	2.297.931	2.373.073	2.110.451
Subang	2.327.072	2.529.759	2.732.899	2.965.468	3.064.218	2.723.883
Purwakarta	3.169.549	3.445.616	3.722.299	4.039.067	4.173.568	3.710.020
Karawang	3.605.272	3.919.291	4.234.010	4.549.324	4.798.312	4.221.242
Bekasi	3.530.438	3.837.939	4.229.756	4.498.961	4.791.843	4.177.787
Bandung Barat	2.468.289	2.683.277	2.898.744	3.145.427	3.248.283	2.888.804
Pangandaran	1.433.901	1.558.793	1.714.673	1.860.591	1.860.591	1.685.710
Kota Bogor	3.272.143	3.557.146	3.842.785	4.169.806	4.169.806	3.802.337
Kota Sukabumi	1.985.494	2.158.430	2.331.752	2.530.182	2.530.182	2.307.208
Kota Bandung	2.843.662	3.091.345	3.339.580	3.623.778	3.742.276	3.328.128
Kota Cirebon	1.741.682	1.893.383	2.054.422	2.219.487	2.269.556	2.035.706
Kota Bekasi	3.601.650	3.915.353	4.229.756	4.589.708	4.782.935	4.223.880
Kota Depok	3.297.489	3.584.700	3.872.551	4.202.105	4.339.514	3.859.272
Kota Cimahi	2.463.461	2.678.028	2.893.074	3.139.274	3.241.929	2.883.153
Kota Tasikmalaya	1.776.686	1.920.937	2.086.529	2.264.093	2.264.093	2.062.468
Kota Banjar	1.437.522	1.562.730	1.688.217	1.831.884	1.831.884	1.670.447

II. Hasil Transformasi Data

Kabupaten/ Kota	Tahun	Y	X1	Ln_X2	Ln_X3
Bogor	2017	0,380	5,92	10,35063	8,072327
Bogor	2018	0,416	6,19	10,42216	8,155839
Bogor	2019	0,404	5,85	10,47211	8,233078
Bogor	2020	0,381	-1,76	10,39758	8,314751
Bogor	2021	0,395	3,55	10,46213	8,346927
Sukabumi	2017	0,330	5,75	9,530578	7,773405
Sukabumi	2018	0,329	5,81	9,60057	7,85692
Sukabumi	2019	0,347	5,64	9,691108	7,934159
Sukabumi	2020	0,334	-0,91	9,763254	8,015833
Sukabumi	2021	0,343	3,74	9,865236	8,04733
Cianjur	2017	0,350	5,77	8,88811	7,595443
Cianjur	2018	0,370	6,24	8,959973	7,678955
Cianjur	2019	0,363	5,67	9,026187	7,756195
Cianjur	2020	0,350	-0,77	9,060426	7,837866
Cianjur	2021	0,343	3,48	8,979288	7,837866
Bandung	2017	0,390	6,15	8,725134	7,809322
Bandung	2018	0,418	6,26	8,793054	7,892833
Bandung	2019	0,355	6,36	8,848491	8,1136
Bandung	2020	0,414	-1,80	8,784034	8,051746
Bandung	2021	0,386	3,56	8,854977	8,083921
Garut	2017	0,370	4,91	9,153247	7,338823
Garut	2018	0,371	4,96	9,207173	7,422338
Garut	2019	0,352	5,02	9,245443	7,499578
Garut	2020	0,352	-1,26	9,132631	7,581251
Garut	2021	0,322	3,58	9,229639	7,581251
Tasikmalaya	2017	0,320	5,95	8,396936	7,477423
Tasikmalaya	2018	0,353	5,70	8,465921	7,560565
Tasikmalaya	2019	0,322	5,43	8,522809	7,637803
Tasikmalaya	2020	0,343	-0,98	8,476409	7,719476
Tasikmalaya	2021	0,378	3,43	8,53618	7,719476
Ciamis	2017	0,360	5,21	8,5806	7,296949
Ciamis	2018	0,309	5,31	8,634233	7,3799
Ciamis	2019	0,354	5,38	8,571052	7,457702
Ciamis	2020	0,336	-0,14	8,622959	7,539373
Ciamis	2021	0,342	3,66	8,628035	7,539373

Kuningan	2017	0,320	6,36	8,248113	7,298005
Kuningan	2018	0,397	6,43	8,326156	7,381521
Kuningan	2019	0,435	6,59	8,373519	7,458757
Kuningan	2020	0,361	0,11	8,301668	7,54043
Kuningan	2021	0,349	3,56	8,366268	7,54043
Cirebon	2017	0,360	5,06	9,229819	7,452153
Cirebon	2018	0,364	5,02	9,275303	7,53567
Cirebon	2019	0,344	4,68	9,312745	7,61291
Cirebon	2020	0,338	-1,08	9,219666	7,694579
Cirebon	2021	0,339	2,47	9,258058	7,727337
Majalengka	2017	0,350	6,81	8,890401	7,330163
Majalengka	2018	0,365	6,48	8,93406	7,410656
Majalengka	2019	0,347	7,77	8,968014	7,490915
Majalengka	2020	0,336	0,89	8,917713	7,572585
Majalengka	2021	0,354	4,75	8,984694	7,605392
Sumedang	2017	0,390	6,23	8,896729	7,809322
Sumedang	2018	0,420	5,79	9,006963	7,892833
Sumedang	2019	0,344	6,33	9,078662	7,970074
Sumedang	2020	0,384	-1,12	9,006579	8,051746
Sumedang	2021	0,359	3,17	9,102629	8,083921
Indramayu	2017	0,290	1,43	9,029816	7,497335
Indramayu	2018	0,316	1,34	9,092473	7,580853
Indramayu	2019	0,284	3,20	9,133348	7,658091
Indramayu	2020	0,319	-1,58	9,050962	7,739764
Indramayu	2021	0,321	0,58	9,122908	7,77194
Subang	2017	0,340	5,10	8,841558	7,77194
Subang	2018	0,334	4,41	8,897185	7,835876
Subang	2019	0,333	4,61	8,925656	7,913115
Subang	2020	0,350	-1,15	8,840997	7,994787
Subang	2021	0,329	2,18	8,909524	8,027545
Purwakarta	2017	0,390	5,15	9,261138	8,061342
Purwakarta	2018	0,397	4,98	9,282856	8,144856
Purwakarta	2019	0,399	4,37	9,305861	8,222094
Purwakarta	2020	0,414	-2,13	9,218955	8,303767
Purwakarta	2021	0,388	3,42	9,278483	8,336525
Karawang	2017	0,350	5,13	10,161	8,190152
Karawang	2018	0,331	6,04	10,18833	8,273643
Karawang	2019	0,357	4,21	10,20476	8,371797
Karawang	2020	0,327	-3,80	10,09438	8,422733

Karawang	2021	0,374	5,85	10,15778	8,476019
Bekasi	2017	0,340	5,68	10,7578	7,836145
Bekasi	2018	0,356	6,02	10,83872	8,252688
Bekasi	2019	0,354	3,95	10,86592	8,349898
Bekasi	2020	0,372	-3,39	10,71461	8,411602
Bekasi	2021	0,340	3,62	10,79053	8,47467
Bandung Barat	2017	0,410	5,21	8,725134	7,811277
Bandung Barat	2018	0,394	5,50	8,793054	7,894791
Bandung Barat	2019	0,362	5,05	8,848491	7,972031
Bandung Barat	2020	0,376	-2,41	8,784034	8,05656
Bandung Barat	2021	0,356	3,46	8,854977	8,085881
Pangandaran	2017	0,350	5,10	7,479198	7,268153
Pangandaran	2018	0,303	5,32	7,482164	7,351665
Pangandaran	2019	0,310	5,94	7,519926	7,446976
Pangandaran	2020	0,335	-0,05	7,429153	7,528649
Pangandaran	2021	0,320	3,67	7,484829	7,528649
Kota Bogor	2017	0,410	6,12	9,230575	8,093199
Kota Bogor	2018	0,389	6,14	9,279964	8,176712
Kota Bogor	2019	0,386	6,19	9,331944	8,253951
Kota Bogor	2020	0,412	-0,41	9,257498	8,335623
Kota Bogor	2021	0,441	3,76	9,337674	8,335623
Kota Sukabumi	2017	0,400	5,43	7,438977	7,593621
Kota Sukabumi	2018	0,410	5,52	7,536375	7,677136
Kota Sukabumi	2019	0,419	5,53	7,617927	7,754374
Kota Sukabumi	2020	0,397	-1,49	7,556783	7,836046
Kota Sukabumi	2021	0,436	3,71	7,660487	7,836046
Kota Bandung	2017	0,430	7,21	10,81474	7,952847
Kota Bandung	2018	0,423	7,08	10,87862	8,03636
Kota Bandung	2019	0,442	6,79	10,92181	8,1136
Kota Bandung	2020	0,402	-2,28	10,81932	8,19527
Kota Bandung	2021	0,427	3,76	10,87285	8,227448
Kota Cirebon	2017	0,410	5,80	8,366912	7,462605
Kota Cirebon	2018	0,432	6,20	8,422159	7,546119
Kota Cirebon	2019	0,408	6,29	8,452294	7,627749
Kota Cirebon	2020	0,421	-0,98	8,40207	7,705028
Kota Cirebon	2021	0,489	3,05	8,419261	7,727337
Kota Bekasi	2017	0,350	5,73	10,0599	8,189147
Kota Bekasi	2018	0,336	5,86	10,11326	8,272655
Kota Bekasi	2019	0,352	5,41	10,01674	8,349898

Kota Bekasi	2020	0,352	-2,58	10,06076	8,43157
Kota Bekasi	2021	0,401	3,22	10,07792	8,472809
Kota Depok	2017	0,350	6,75	9,98825	8,100914
Kota Depok	2018	0,365	6,97	10,08364	8,18443
Kota Depok	2019	0,344	6,74	10,13517	8,261668
Kota Depok	2020	0,344	-1,92	10,09894	8,34334
Kota Depok	2021	0,367	3,76	10,15336	8,375517
Kota Cimahi	2017	0,370	5,43	8,831474	7,809322
Kota Cimahi	2018	0,364	6,46	8,893494	7,892833
Kota Cimahi	2019	0,437	7,85	8,932492	7,970074
Kota Cimahi	2020	0,380	-2,26	8,858508	8,051746
Kota Cimahi	2021	0,415	4,19	8,925591	8,083921
Kota Tasikmalaya	2017	0,420	6,07	8,316146	7,482502
Kota Tasikmalaya	2018	0,390	5,93	8,399189	7,560565
Kota Tasikmalaya	2019	0,360	5,97	8,407177	7,643253
Kota Tasikmalaya	2020	0,366	-2,01	8,476409	7,724928
Kota Tasikmalaya	2021	0,414	3,57	8,536188	7,724928
Kota Banjar	2017	0,380	5,30	6,787665	7,270675
Kota Banjar	2018	0,322	5,05	6,855683	7,35419
Kota Banjar	2019	0,302	5,03	6,910781	7,431424
Kota Banjar	2020	0,312	0,94	6,850031	7,513098
Kota Banjar	2021	0,341	3,49	6,921303	7,513098

III. Hasil Estimasi

Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: INDEKS_GINI

Method: Panel Least Squares

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 27

Total panel (balanced) observations: 135

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.035296	0.083521	0.422598	0.6733
PERTUMBUHAN_EKONOMI	0.002748	0.001097	2.505623	0.0134
LN_INVESTASI	-0.008380	0.004752	-1.763341	0.0802
LN_UPAH	0.050616	0.013781	3.672972	0.0003
R-squared	0.118593	Mean dependent var		0.367237
Adjusted R-squared	0.098408	S.D. dependent var		0.037287
S.E. of regression	0.035405	Akaike info criterion		-3.814737
Sum squared resid	0.164212	Schwarz criterion		-3.728655
Log likelihood	261.4948	Hannan-Quinn criter.		-3.779756
F-statistic	5.875348	Durbin-Watson stat		0.768990
Prob(F-statistic)	0.000854			

Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: INDEKS_GINI
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 03/30/23 Time: 16:38
 Sample: 2017 2021
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 27
 Total panel (balanced) observations: 135

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.137744	0.112555	1.223785	0.2232
PERTUMBUHAN_EKONOMI	0.001450	0.000794	1.825905	0.0701
LN_INVESTASI	-0.004910	0.007590	-0.646838	0.5189
LN_UPAH	0.034192	0.018044	1.894891	0.0603

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.026942	0.5990
Idiosyncratic random		0.022045	0.4010

Weighted Statistics			
R-squared	0.036671	Mean dependent var	0.126196
Adjusted R-squared	0.014610	S.D. dependent var	0.022447
S.E. of regression	0.022282	Sum squared resid	0.065042
F-statistic	1.662271	Durbin-Watson stat	1.832811
Prob(F-statistic)	0.178295		

Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: INDEKS_GINI

Method: Panel Least Squares

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 27

Total panel (balanced) observations: 135

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.363037	0.340319	1.066756	0.2885
PERTUMBUHAN_EKONOMI	0.001057	0.000973	1.085946	0.2800
LN_INVESTASI	-0.019419	0.048725	-0.398537	0.6910
LN_UPAH	0.022433	0.029205	0.768115	0.4441

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.726114	Mean dependent var	0.367237
Adjusted R-squared	0.650470	S.D. dependent var	0.037287
S.E. of regression	0.022045	Akaike info criterion	-4.598361
Sum squared resid	0.051027	Schwarz criterion	-3.952744
Log likelihood	340.3893	Hannan-Quinn criter.	-4.336000
F-statistic	9.599025	Durbin-Watson stat	2.305548
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: PANEL

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8.957939	(26,105)	0.0000
Cross-section Chi-square	157.789168	26	0.0000

Uji Hausman

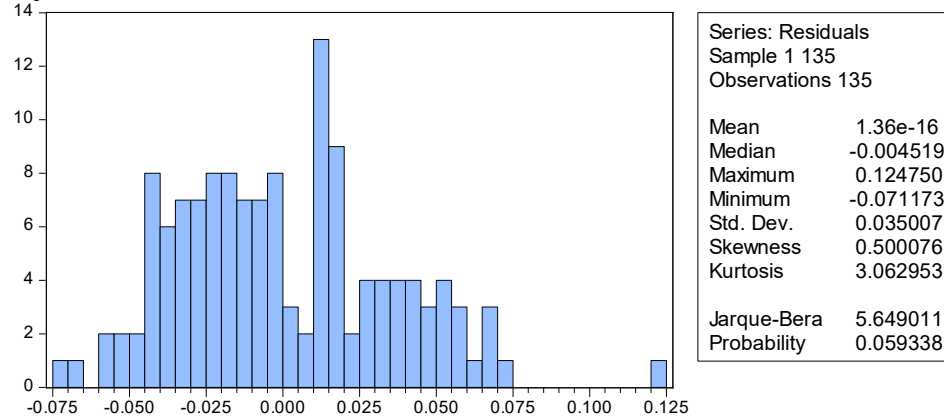
Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: PANEL

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.840782	3	0.1196

Uji Normalitas



Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 03/30/23 Time: 16:42

Sample: 1 135

Included observations: 135

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.006976	751.2548	NA
PERTUMBUHAN_EKON			
OMI	1.20E-06	2.956778	1.082326
LN_INVESTASI	2.26E-05	201.8273	2.134522
LN_UPAH	0.000190	1263.073	2.225859

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	0.919532	Prob. F(3,131)	0.4334
Obs*R-squared	2.784199	Prob. Chi-Square(3)	0.4261
Scaled explained SS	2.394597	Prob. Chi-Square(3)	0.4946

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	28.84645	Prob. F(2,129)	0.0000
Obs*R-squared	41.71847	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Common Fixed Effect (CEM) dengan transformasi GLS dan White Cross Section

Dependent Variable: INDEKS_GINI

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 27

Total panel (balanced) observations: 135

Linear estimation after one-step weighting matrix

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.029056	0.041287	0.703760	0.4828
PERTUMBUHAN_EKONOMI	0.002712	0.000606	4.479063	0.0000
LN_INVESTASI	-0.010605	0.002381	-4.454879	0.0000
LN_UPAH	0.053711	0.007371	7.286791	0.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.248550	Mean dependent var	0.488578	
Adjusted R-squared	0.231341	S.D. dependent var	0.256329	
S.E. of regression	0.035117	Sum squared resid	0.161549	
F-statistic	14.44323	Durbin-Watson stat	1.738164	
Prob(F-statistic)	0.000000			

IV. Koefisien Kabupaten/Kota

	KAB_KOT	Effect
1	Bogor	0.019118
2	Sukabumi	-0.026780
3	Cianjur	-0.007975
4	Bandung	0.016677
5	Garut	-9.85E-05
6	Tasikmalaya	-0.016949
7	Ciamis	-0.013577
8	Kuningan	0.012626
9	Cirebon	-0.007039
10	Majalengka	-0.006192
11	Sumedang	0.006875
12	Indramayu	-0.044211
13	Subang	-0.027989
14	Purwakarta	0.017589
15	Karawang	-0.026904
16	Bekasi	-0.017244
17	Bandung Barat	0.006953
18	Pangandaran	-0.032708
19	Kota Bogor	0.024186
20	Kota Sukabumi	0.036806
21	Kota Bandung	0.050014

22	Kota Cirebon	0.061139
23	Kota Bekasi	-0.018089
24	Kota Depok	-0.020156
25	Kota Cimahi	0.018157
26	Kota Tasikmalaya	0.023967
27	Kota Banjar	-0.028193

V. Biodata

BIODATA

Identitas Penulis

Nama : Evanty Caesarisma
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 30 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Bumi Tamalanrea
Permai, Blok M No. 134
Telepon/HP : 089601306245
Alamat/Email : evantyy.caesarisma00@gmail.com



Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- | | |
|--|-----------------|
| 1. SDN Inpres Tamalanrea I | Tahun 2008-2013 |
| 2. SMPN 30 Makassar | Tahun 2013-2016 |
| 3. SMAN 21 Makassar | Tahun 2017-2019 |
| 4. S1 Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Hasanuddin | Tahun 2019-2023 |

Pendidikan Non Formal

1. Basic Learning Skills, Character & Creativity (BALANCE), Universitas Hasanuddin
2. Pendidikan Tingkat Dasar Organisasi Koperasi Mahasiswa Universitas Hasanuddin
3. Pendidikan Tingkat Menengah Organisasi Koperasi Mahasiswa Universitas Hasanuddin

Makassar, 3 April 2023

Evanty Caesarisma